

KEAMANAN SOSIAL DAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI PULAU TERLUAR INDONESIA: STUDI KABUPATEN KEPULAUAN RAJA AMPAT*

*Poltak Partogi Nainggolan***

Abstract

The Raja Ampat archipelago, a new municipality in West Papua Province, is one of Indonesia's outer islands, which is vulnerable from any form of security threats, especially social and environmental security because of its natural resources potentials -in particular its coral reefs- and important position from the aspects of geopolitics and geostrategy. A study from both security point of views is currently needed in time of the rising threats to the archipelago coming from the intensifying presence of foreign investors and visitors. This study is completed with field researches, interviews, and FGD with various parties conducted in 2011.

Keywords: social security, environmental security, outer islands, Raja Ampat

Abstrak

Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Provinsi Papua Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan mendesak dilakukan mengingat berbagai kepentingan yang mengancam kepulauan itu, yakni meningkatnya kehadiran asing dan kondisi ancaman keamanan di sana. Studi ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak pada tahun 2011.

Kata Kunci: keamanan sosial, keamanan lingkungan, pulau terluar, Raja Ampat

* Penulis menyampaikan terima kasih untuk kritik, masukan, dan koreksi dari Dr. Ganewati Wuryandari, MA dari LIPI.

** Peneliti Utama bidang masalah-masalah Hubungan Internasional P3DI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, dapat dihubungi email: pptogin@yahoo.com

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, yang terdiri dari 13.466 pulau besar dan kecil, yang tersebar dari wilayah Barat sampai Timur, dan merupakan negara salah satu dengan garis pantai yang terpanjang di dunia.¹ Tepatnya, negara ini memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer, ke-empat terbesar di dunia setelah Kanada, AS, dan Rusia. Letak Indonesia begitu strategis karena diapit oleh 2 samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dengan 92 pulau terluar yang mengelilingi perairan dan membatasi 12 negara, di wilayah darat, laut, dan udara.² Dari keseluruhan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, sekitar 23,5% merupakan sumbangan dari sektor kelautan.³ Dengan potensi kekayaan alam yang dimilikinya serta luas wilayah dan letak pulau yang tersebar dalam hamparan garis pantai yang panjang itu, Indonesia sangat rawan dari ancaman kepentingan asing melalui kegiatan yang beragam di bidang sosial, ekonomi, militer dan lain-lain.

Kepulauan Raja Ampat yang merupakan kabupaten baru sejak tahun 2002, dengan UU No. 26/ 2002, di Provinsi Papua Barat adalah salah satu pulau terluar yang penting posisinya secara historis, politik dan ekonomis sejak kedatangan kaum kolonial. Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat dimekarkan sebagai kabupaten tersendiri dari induknya Kabupaten Sorong. Kabupaten ini rawan dari sasaran pihak/negara asing, karena potensinya yang kaya akan sumber daya alam, yang secara geografis dan geoekonomis memiliki kelebihan sebagai kawasan cagar alam dan konservasi laut. Dari FGD diperoleh informasi, banyak peneliti dan pihak asing yang berminat dan melanjutkan riset mereka di sana. Sedangkan riset-riset dari dalam negeri belum banyak dilakukan.⁴

Kepulauan Raja Ampat dikatakan sebagai salah satu dari sepuluh perairan terbaik untuk olah raga selam (*diving*) di dunia. Wilayah ini terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misool, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta, dari 610 pulau yang ada. Dihitung secara keseluruhan, termasuk yang tidak ada penghuninya dan belum bernama, terdapat 1800 pulau yang tersebar di

1 Berdasarkan survai geografi dan toponimi tahun 2010 yang telah dilaporkan pada PBB, lihat "Hanya Ada 13.466 Pulau di Indonesia," *Kompas*, 8 Februari 2011: 13.

2 Makalah presentasi Prof. Rizald Max Rompas, Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, dalam FGD di P3DI Setjen DPR pada 4 Agustus 2011.

3 Informasi dari Prof. Tridoyo Kusumastanto, Kepala Pusat Kajian Sumber-daya Pesisir dan Lautan IPB pada wawancara di Kampus Pasca-Sarjana IPB Bogor pada 11 Agustus 2011.

4 FGD dengan Prof. Dr. Dietrich Bengen, peneliti IPB, Arief Yuwono, Deputi Penanggulangan Kerusakan LH, KLH, dan Ir. Sigit, Kasubdit Pemberdayaan Pulau-pulau Pesisir KKP, di P3DI pada 18 Nopember 2011 di P3I, Setjen DPR, Jakarta.

kabupaten kepulauan itu. Hanya 35 pulau yang selama ini didiami.⁵ Jadi, hanya sedikit sekali pulau yang berpenghuni, selain terdapat 400 pulau yang belum punya nama.

Ibukota Kabupaten Raja Ampat yaitu Waisai terletak di Pulau Waigeo. Bagian pulau terluar berbatasan dengan Kepulauan (Negara) Palau, dan Filipina. Di seluruh kepulauan di kabupaten ini terdapat 537 jenis terumbu karang yang sangat menakjubkan, mewakili 75% jenis karang yang ada di dunia. Di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat ini juga terdapat 1.074 jenis (*species*) ikan dan tumbuhan endemik dan ribuan penyu.⁶ Ikan kuwe, kakap, kerapu, hiu karang, napoleon, wrase, barracuda, dan tuna merupakan kekayaan alam yang dimiliki perairan di sana⁷ Kuatnya arus samudera di kawasan Kabupaten Raja Ampat berperan dalam menyebarkan larva karang dan ikan yang melewati Samudera Hindia dan Pasifik ke ekosisten karang lainnya. Letak Kabupaten Kepulauan ini yang berada di wilayah segitiga terumbu karang dunia (*world coral triangle*). yang terbentang di Kepulauan Pasifik (Papua Niugini atau PNG-Australia-Indonesia-Malaysia-Filipina) menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan yang paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia. Topografi bawah laut yang sangat indah telah membuat kekayaan terumbu karang Raja Ampat sebagai salah satu yang harus dilindungi di dunia oleh lembaga konservasi alam internasional.

Dapat dikatakan seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat terletak di dekat Laut Pasifik, kawasan paling timur Indonesia. Kabupaten Raja Amat, dengan 32.055 jiwa penduduknya, dikenal sebagai Kabupaten Bahari, karena posisinya yang dominan dengan wilayah perairan yang kaya ikan dengan panoramanya yang indah. Potensinya sebagai daerah wisata bahari dan perikanan belum banyak digali dan dimanfaatkan.

Wilayah kabupaten Raja Ampat sangat rentan mengalami erosi dan kerusakan alam lainnya akibat aktifitas manusia, terutama pertambangan dan penebangan pohon. Obyek wisata bahari kabupaten induknya, yaitu Sorong, yang terkenal

5 Wawancara dengan Sekda Drs. Ferdinand Dimara, Msi, di Waisai, pada 23 Nopember 2011.

6 "Kepulauan Raja Ampat Pusat Segitiga Karang," Majalah *Topik Online*, <http://www.majalahtopik.co.id/readnews.php?id=80>, diakses pada 10 Agustus 2011. Juga, wawancara dengan Marcus Wanma, Bupati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011; wawancara dengan Arthemas Mambisau, Kabappeda Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011; dan wawancara dengan Sekda Drs. Ferdinand Dimara, Msi, di Waisai, pada 23 Nopember 2011. Dalam wawancara dengan pejabat yang terakhir disebutkan, terungkap terdapat 553 jenis terumbu karang.

7 Perairan laut Kabupaten Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat bertelur ikan kerapu dan berkembang biaknya ikan tuna, karena tempat pertemuan arus dari Selatan dan Samudera Pasifik. Ikan kerapu banyak ditangkap nelayan setempat untuk dijual ke kapal besar di pelabuhan Kendari yang akan membawanya ke Hong Kong. Wawancara dengan Kadis Pariwisata Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo, di Waisai dan dalam perjalanan ke Waisai-Sorong pada 23 dan 24 Nopember 2011.

dengan pantai dan terumbu karangnya, sebagian terletak di Raja Ampat, yang kini sudah berkembang menjadi kabupaten sendiri. Seperti halnya Pulau Morotai, wilayah kabupaten induk Sorong, terutama Pulau Duawarur dan Pulau Jefman, merupakan situs sejarah PD II. Pulau Jefman, yang berpasir putih adalah bekas pengkalan angkatan udara sekutu, yang sampai sekarang landasan pesawatnya masih berfungsi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kepulauan Raja Ampat masih berada dalam kawasan yang strategis di Laut Pasifik.

Laporan Akhir Valuasi Ekonomi SDA Kepulauan Raja Ampat, yang disusun *Conservation International Indonesia* dan Universitas Negeri Papua pada tahun 2006 mencatat bahwa pemanfaatan sumber daya laut mencapai Rp. 126 milyar per tahun, terdiri dari perikanan tradisional sebesar Rp. 63 milyar, perikanan tangkap komersial sebesar Rp. 20 milyar, budidaya mutiara Rp. 41 milyar, pengumpulan biota terapung dan lola Rp. 2 milyar, dan budidaya rumput laut Rp. 23 juta.⁸ Selama ini diketahui, sektor pertambangan dan penebangan hutan telah menyumbang besar bagi pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat.

Potensi yang dapat lebih digali di sana adalah sektor pariwisata dan perikanan. Sektor pariwisata baru menyumbangkan sebesar Rp. 45 juta, ditambah pajak restoran dan hotel sebesar Rp. 75 juta.⁹ Potensi yang besar di sektor pariwisata dan perikanan berperan menambah pemasukan kas pemerintah daerah (pemda) dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya nelayan. Namun, hal ini berdampak menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan. Karena, pembangunan infrastruktur lebih lanjut akan memberikan implikasi luas bagi kondisi alam Raja Ampat yang masih belum banyak terjamah, dan sangat sensitif terhadap berbagai perubahan ekosistem sekitarnya. Tulisan ini menganalisis apa saja ancaman keamanan sosial dan lingkungan yang dihadapi di kabupaten kepulauan yang telah dimekarkan itu, dan bagaimana respons pemerintah kabupaten dalam menghadapi kedua jenis ancaman keamanan tersebut. Studi literatur, kunjungan lapangan, dan interview mendalam melengkapi penyusunan kajian yang dibuat.

8 Ichwam Susanto, "Potensi Wilayah: Kekayaan Laut Raja Ampat yang 'Terlupakan.'", *Kompas*, 24 Agustus 2007: 62.

9 *Ibid.*

II. Pemahaman tentang Keamanan Sosial dan Keamanan Lingkungan

Konsep keamanan sosial telah berkembang luas, lebih dari sekedar menjelaskan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, sejak terminologi keamanan non-tradisional atau non-konvensional dikenal pada akhir era dasawarsa 1980.¹⁰ Keamanan sosial dalam hal ini melingkupi pula kondisi perekonomian suatu komunitas yang besar, perkembangan kondisi lingkungan (hidup) di sekitarnya, dan, yang lebih spesifik, kondisi kesehatan dan juga kondisi keamanan individual warga yang hidup di dalam habitat itu. Dengan demikian, keamanan sosial terkait erat dengan keamanan wilayah atau lingkungan. Dalam terminologi aslinya, dikenal istilah *human security*, *economic security*, *health security*, dan *environmental security*.¹¹

Masalah keamanan manusia (*human security*) mulai gencar dikampanyekan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menarik perhatian dunia, terutama para pembuat kebijakan, terhadap pentingnya isu ini setelah isu keamanan nasional dan keamanan internasional tidak lagi muncul dari perlombaan senjata-senjata strategis (nuklir). Situasi global pasca-Perang Dingin yang memperlihatkan maraknya konflik-konflik domestik yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang keliru, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan yang diskriminatif telah mendorong PBB melalui berbagai institusi di bawah koordinasinya untuk mengedepankan kebijakan yang mendukung perlindungan dan sekaligus penguatan atas kondisi kemanan manusia di banyak negara yang dibantunya.

Seiring dengan mencuatnya gagasan keamanan manusia, para ahli hubungan internasional lebih luas melihat relevansi antara keamanan nasional dan internasional dalam interaksi antar-negara dengan kondisi ekonomi yang berkembang dan manfaat ekonomi yang diperoleh setiap negara. Karena itulah kemudian, Barry Buzan di antaranya, mengemukakan pentingnya pemahaman keamanan ekonomi (*economic security*).¹² Sementara, ahli lainnya, seperti halnya Thomas F. Holmer-Dixon, mengulas tentang apa yang disebut sebagai keamanan lingkungan (*environmental security*) dengan memperhatikan sekali berbagai aspek lingkungan hidup yang dinilai dapat berdampak luas, baik secara langsung ataupun tidak langsung, cepat atau lambat, terhadap keamanan domestik dan regional.¹³ Selanjutnya, dalam diskusi yang lebih luas tentang hubungan

10 Lihat Buzan, Barry. *People, State, and Fear*. Sussex: Wheatsheaf, 1983 dan Buzan, Barry dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, New York: Cambridge University Press, 2009.

11 Buzan, 1983, *op. cit.*

12 *Ibid.*

13 Thomas F. Holmer-Dixon, *Environment, Scarcity and Violence*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1999; Homer-Dixon, Thomas F dan Jessic Blitt. *Evidence: Links Among Environment, Population, and Scarcity*. New York: Rowman and Littlefield, 1991.

internasional mulai dibicarakan konsep keamanan kesehatan (*health security*), termasuk dalam studi-studi lebih luas Barry Buzan tentang keamanan.¹⁴

Dalam konsep keamanan manusia, hal-hal tentang pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar dituntut untuk menjadi perhatian dalam hubungan antarnegara. Sebagai konsekuensinya, tingkat kesejahteraan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, tersedianya fasilitas pendidikan dasar dan infrastruktur lainnya berikut kelayakan kondisinya menjadi tolak ukur baik-buruknya kondisi keamanan manusia di suatu negara. Sedangkan tersedianya air bersih, sanitasi yang layak untuk setiap rumah tangga, jumlah rumah sakit yang sebanding dengan jumlah penduduk yang memerlukan serta kualitasnya yang memadai menjadi tolak ukur baik-buruknya kualitas keamanan kesehatan yang ada di suatu negara. Sementara, perkembangan inflasi di suatu negara, tinggi-rendahnya angka pengangguran, marak atau tidaknya korupsi dan kesehatan bank-bank menjadi pegangan untuk menilai sejauh mana kondisi keamanan ekonomi yang ada. Pada sisi lain, baik atau buruknya kebijakan pemerintah dalam melindungi lingkungan hidup, masalah degradasi lingkungan, bencana banjir, *rob* dan lain-lain yang sering muncul di suatu negara, menjadi ukuran tingkat keamanan lingkungan yang dapat dilindungi di suatu negara.

Kondisi keamanan manusia, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan, sebagai bagian dari konsep keamanan sosial yang luas, akan menentukan tingkat ancaman yang ada. Demikian pula, antara kondisi keamanan dan tingkat ancaman berbanding searah. Sehingga, bila tingkat keamanan manusia, yang disebut juga keamanan insani, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan rendah, maka tingkat ancamannya akan tinggi. Ini juga berarti setiap kemerosotan tingkat kondisi di satu sisi, akan diikuti oleh kemerosotan tingkat kondisi di sisi lain. .

III. Potensi SDA dan Kegiatan Investor

Dewasa ini terdapat 16 perusahaan tambang nikel yang diberi ijin beroperasi di kawasan Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan yang sudah beroperasi dan mengekspor material pasir logam adalah PT ASP, PT ASI, dan PT KMS, dengan negara tujuan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Australia. Adapun RRC menerima material pasir logam besi (*lemonite*) dan Australia pasir logam, nikel (*lateite*).

Lebih jauh diinformasikan, perusahaan pembeli pasir logam dari Australia adalah QNI (*Queensland Nickel International*), anak perusahaan BHP Biliton

¹⁴ Buzan, 2009, *op.cit.* Juga, Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998.

yang dominan sahamnya dimiliki oleh perusahaan tambang raksasa dunia (Rio Tinto). Kota pelabuhan Townsville, Queensland, telah melakukan kegiatan bongkar-muat material tambang asal Indonesia sejak awal 2007-2008 sebanyak 20 kali, yang diduga pasir nikelnya berasal dari Raja Ampat. Jumlah total pasir logam yang telah dibongkar-muat sebanyak 913.072.23 ton.¹⁵ Sementara, data lain mengungkapkan tercatat 12 kali pemuatan material pasir logam asal Raja Ampat dengan jumlah total 611.828 ton, dengan rincian masing-masing 8 kali ke Queensland dan 4 kali ke RRC.¹⁶ Ini artinya, kekayaan SDA yang sudah dieksploitasi oleh asing dan dibawa dan dimanfaatkan oleh mereka tidak kecil.

Penanaman modal asing di sektor pariwisata, terutama pengembangan wisata bahari, di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dilakukan oleh pemodal individual. Hanya 1 investasi dalam negeri, dengan investor dari Bali. Investor asing di sini adalah yang terbesar, sampai sekitar 90%, dengan investor dari Eropa dan AS.¹⁷ Mereka beraktifitas dalam pengembangan *land-based tourism*, dengan menyediakan akomodasi (penginapan), dan *mobile tourism*, dengan menyewakan kapal-kapal untuk melihat terumbu karang dengan kegiatan *snorkling* dan *diving*, dan menikmati wisata bahari keliling pulau untuk melihat burung cendrawasih, kakatua, dan berbagai jenis (populasi) ikan. Paket-paket wisata dihitung dalam mata uang dollar AS dan Euro.

Terkait dengan pemanfaatan potensi pariwisata bahari, sampai saat ini terdapat Resort Kri di Pulau Kri dan Resor Sorido yang dikelola PT Papua Diving milik Max Amer asal negeri Belanda. Di samping itu, terdapat 2 penginapan di Pulau Saonek dan 2 *homestay* di Yenwaupnor.¹⁸ Keterlibatan modal asing terkait dengan pengelolaan atau manajemen, kontrak (sampai masa 30 tahun), dan usaha bagi hasil. Seperti dijelaskan Bupati, tidak ada praktek jual pulau untuk memperoleh pemasukan kas di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

Nilai investasi asing di pariwisata bahari sangat maksimal, mencapai 51%. Ini baru berjalan 2-3 tahun belakangan, mengikuti pengembangan Kepulauan Raja Ampat menjadi sebuah kabupaten yang terpisah dari Sorong. Karena itulah, belum banyak pemasukan PAD yang diperoleh dari investasi asing dan

15 Ronny Dimara, "Siapa yang Untung dan Siapa yang Buntung dari Hasil Eksploitasi Tambang Nickel di Raja Ampat," *Papua Merdeka News*, 10 April 2008, <http://www.papuapost.worldpress.com/category/media-spm/opini-analisis/p...>, diakses 10 Agustus 2011.

16 *Ibid.*

17 Wawancara dengan Marcus Wanma, Bupati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011; wawancara dengan Arthemias Mambrisau, Kabappeda Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011; wawancara dengan Kadis Pariwisata Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo, di Waisai dan dalam perjalanan ke Waisai-Sorong pada 23 dan 24 Nopember 2011.

18 Ichwam Susanto, "Potensi Wilayah: Kekayaan Laut Raja Ampat yang 'Terlupakan,'" *Kompas*, 24 Agustus 2007: 62.

domestik dari sektor kegiatan ini, hanya sekitar Rp. 15 milyar untuk tahun 2010 dari APBD sebesar Rp. 567 milyar.¹⁹ Kegiatan wisata bahari di Kepulauan Raja Ampat sudah dikenal luas sampai ke mancanegara. Namun, kondisi infrastruktur masih perlu terus dibangun, mengingat wilayah ini baru dibuka dan dikembangkan.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat dikembangkan dengan pola *cluster*. Investasi asing di bidang pertambangan berfokus di Waigeo Utara dan Timur, sedangkan untuk pariwisata dan perikanan di Waigeo Barat. Untuk pertanian berpusat di Pulau Salawati dan bagian tengah Provinsi Papua Barat. Pulau Misool Selatan dikembangkan untuk pembangunan pariwisata, sedangkan Pulau Misool Utara dan Timur dikembangkan untuk perikanan.

Di luar investasi, keterlibatan asing berwujud kerja sama terkait konservasi atau pemeliharaan potensi kelautan dan perikanan. World Bank (Bank Dunia) terlibat dengan proyek bantuannya melalui pendidikan dan pelatihan *Coremap* (*Coral Reef Rehabilitation and Management Project*), yang melibatkan pemangku kepentingan yang beragam terkait kegiatan konservasi terumbu karang. Selain ini, ada bantuan hibah Bank Dunia mencapai 5 juta dolar AS untuk pembangunan desa tertinggal, yang bernama *village grant*.²⁰ Kegiatannya sudah mencapai tahap ke-2, dan baru saja menyelesaikan pelatihan di Waisai ketika *fieldworks* ini berlangsung. *Concervation International* (CI) juga aktif dalam proyek pelestarian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, dengan bantuan Kanada dan donor lainnya. Di samping itu, ada DMC dan TNC (*The Nature Conservation*). Sebagai tambahan, ada kerja sama dengan Belanda, Jerman, AS, Swiss, dan Inggris untuk pengembangan wisata.

Dengan Jerman, yakni Universitas Stuttgart, pernah dibicarakan rencana kerja sama pembangunan pusat riset pemanfaatan terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, namun kelanjutannya tidak ada. Dengan AS, pernah ada usulan kerja sama riset dari Universitas Arizona untuk penelitian dan pengembangan *sponge*.²¹ Di negara asing tetangga Raja Ampat terdekat, Palau, yang berbatasan dengan Pulau Fani, sudah dibangun pusat riset kelautan, *Ocean Park*, sebuah proyek kerja sama dengan Jepang melalui JICA.²²

19 Wawancara dengan Marcus Wanma, Bupati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011; wawancara dengan Arthemias Mambrisau, Kabappeda Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

20 *Ibid.*

21 Wawancara dengan Sekda Drs. Ferdinand Dimara, Msi, di Waisai, pada 23 Nopember 2011.

22 Wawancara dengan Martinus Mambraku, Kabid Perbatasan Pemkab Raja Ampat, di Waisai pada 23 Nopember 2011.

IV. Keamanan Sosial

Adanya tudingan bahwa Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu wilayah yang Bupati-nya menyewakan pulau di wilayahnya untuk dikelola orang asing merupakan bentuk salah satu ancaman ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum, di kabupaten ini ada pulau “milik” orang Swiss, orang Belanda, orang Jerman, dan orang Selandia Baru.²³ Sampai dewasa ini dipertanyakan apakah mereka sebatas mengelola atau memiliki kewenangan lebih jauh dari itu, misalnya, boleh melarang penduduk setempat masuk ke dan dari wilayah tersebut, sebagai mana halnya pemilik. Sementara, penduduk setempat menuntut pengakuan hak ulayat (hak adat) atas tanah yang mereka miliki turun-temurun.²⁴

Kebijakan dan pola pengelolaan SDA yang salah atau keliru akan membawa dampak negatif pada kondisi ekonomi Kabupaten Raja Ampat. Tanpa memberdayakan penduduk lokal dan merevitalisasi *local wisdom* mereka, pengelolaan SDA akan menanamkan benih-benih konflik antar 2 kelompok yang memiliki perbedaan nilai, yakni investor dan pengelola asing *versus* penduduk pribumi.²⁵ Model penyewaan dan penguasaan SDA secara mutlak, tanpa memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat terhadap kehidupan penduduk pribumi, selain menimbulkan ancaman ekonomi (*economic threat*), juga dapat memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara. Sebab, kehadiran orang asing tidak terkontrol, namun sebaliknya, dapat mengontrol prospek pengembangan Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah pusat dan daerah cenderung menjadi penonton dan kerjanya hanya akan menunggu setoran pajak hasil eksploitasi SDA; dan jika posisinya lebih lemah daripada pengelola dan investor asing, sulit mendikte mereka untuk mengalokasikan pemasukan pajak secara proporsional dan adil, sesuai dengan banyaknya SDA yang telah berhasil mereka eksploitasi. Pemerintah kabupaten harus dapat mengambil pelajaran dari kasus Freeport agar tidak terulang lagi. Belum ada (selesai)-nya Rencana Tata-Ruang dan Wilayah (RTRW) dibuat pemerintah kabupaten, dan lemahnya penegakan hukum, terutama oleh pemerintah pusat yang berwenang dalam membuat persetujuan dan mengontrol pelaksanaan investasi asing, membuat ancaman keamanan sosial, dan sekaligus, lingkungan di sana begitu tinggi. Apalagi dengan adanya kewenangan pemerintah kabupaten membuat persetujuan investasi asing

²³ Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Komnas HAM, Elsam, KontraS, dan Imparsial.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Penjelasan Prof. Dr. Dietrich Bengen, peneliti IPB yang berpengalaman dalam riset di Raja Ampat, dalam FGD di P3DI, Setjen DPR, Jakarta, pada 18 Nopember 2011. Juga, keterangan yang senada dari Deputi Penanggulangan Kerusakan LH, KLH, Arief Yuwono, dalam FGD di P3DI, Setjen DPR, Jakarta, pada 18 Nopember 2011.

di lingkup yang lebih kecil pada saat yang bersamaan dengan maraknya pilkada atau pemilukada yang membutuhkan pembiayaan besar. Seperti praktek yang terjadi di wilayah lain, dikuatirkan, desakan kebutuhan investasi untuk wilayah dan kantong individu akan mengorbankan aturan proteksi untuk konservasi lingkungan alam yang sudah disusun, terutama Perda, yang lebih lemah kedudukannya daripada UU. Sementara, UU Minerba yang kian liberal dan UU Kehutanan yang kontroversial telah mengancam eksploitasi sumber daya alam hingga mencapai hutan lindung atau kawasan konservasi alam melalui upaya yang disebut sebagai “ijin pinjam pakai hutan” (IPPH) ataupun untuk eksploitasi gas alam yang dikatakan “ramah lingkungan” tersebut.

Karena tingginya keinginan pihak asing menanamkan modalnya untuk eksploitasi SDA, terutama nikel, yang berbenturan dengan keberadaan atau pengakuan atas hak ulayat penduduk setempat, dan juga kepentingan pemkab dan aparat keamanan yang besar untuk mengamankan kelangsungan usaha dan modal asing yang sudah ditanamkan, konflik terbuka antara masyarakat lokal versus pemilik modal, pemkab dan aparat keamanan sangat potensial terjadi, atau mudah pecah sewaktu-waktu. Ini artinya, konflik penguasaan dan pengelolaan SDA dapat pula berimplikasi negatif terhadap keamanan dan stabilitas wilayah Kabupaten Raja Ampat. Sebab, banyaknya orang asing berkeliaran di sana saja secara psikologis sudah dapat menimbulkan kekuatiran atas keamanan domestik yang ada, selain terhadap prospek SDA, tanah, hak milik adat, dan lapangan kerja tradisional yang mereka miliki selama ini.²⁶ Sayangnya, pemerintah pusat tidak punya rencana strategis dan desain besar (*grand design*) kebijakan bagi pengembangan Kabupaten Raja Ampat, yang seharusnya bisa menjadi arahan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, di tingkat yang lebih rendah. Mereka tampaknya tidak mau berpikir panjang atau berlelah menyusun rencana dan bekerja dalam jangka panjang, dan hanya siap mengajukan opsi kebijakan pemanfaatan potensi wisata bahari, terutama bawah laut, wilayah itu untuk disewakan sepenuhnya atau dijual kepada pihak asing. Mereka menyatakan perlunya Indonesia belajar dari Malaysia dengan praktek penyewaan dan jual tanah di lokasi wisata bahari yang dimilikinya.²⁷

Diinformasikan, kegiatan eksploitasi tambang besar-besaran di Kabupaten Raja Ampat telah menimbulkan konflik kewenangan antara pemkab (Bupati) dan pemprov (Gubernur). Secara khusus, eksploitasi nikel telah menimbulkan konflik antara Bupati dengan elit politik lokal yang juga merupakan tuan tanah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Diungkapkan Ir. Sigit, Kasubdit Pemberdayaan Pulau-pulau Pesisir KKP, dalam FGD di P3DI, Setjen DPR, Jakarta, pada 18 Nopember 2011.

di sana, dan antara masyarakat lokal dengan pemkab dan aparat keamanan, serta antara kelompok masyarakat lokal yang saling berebut klaim kepemilikan di wilayah tambang yang dieksploitasi.²⁸ Ini menambah kompleksitas masalah di wilayah kabupaten itu, yang selama ini juga terdapat konflik serupa akibat praktek penebangan hutan liar (*illegal logging*).

Konflik kewenangan bermula dari konflik tentang dasar hukum eksploitasi SDA. Ada pihak yang menggunakan regulasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), seperti PT ASI (Anugerah Surya Indotama), yang menetapkan bahwa bila WIUP berada di dalam satu kabupaten atau kota, maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Bupati atau Walikota. Sedangkan PT KSM (Kawei Sejahtera Mining) dan Ricobana menyatakan bahwa mereka memiliki surat izin Gubernur, yang menurut PT ASI tidak berlaku untuk wilayah Raja Ampat yang kini tidak lagi menjadi bagian dari Provinsi Papua, namun Provinsi Papua Barat. Lagi pula, menurut PT ASI, kewenangan gubernur hanya dimiliki untuk mengeluarkan regulasi atau izin penambangan bila wilayah penambangan berada di antara dua wilayah kabupaten atau kota. Sementara, penambangan di Raja Ampat itu berada di satu lokasi kabupaten saja. Konflik ini meluas, setelah pihak luar terlibat, termasuk kuasa hukum PT KSM dan adanya tuduhan pemalsuan surat izin yang dikeluarkan karyawan Dinas Pertambangan Papua, Maran Gultom, yang telah divonis bermasalah dan dijatuhkan hukuman oleh PN Jayapura. Konflik pertambangan ini telah dilaporkan dan memperoleh perhatian Komisi I DPR sejak Mei 2010, yang mempertanyakan kegiatan PT KSM dan Ricobana, yang telah melayangkan gugatan kepada Bupati Raja Ampat, Marcus Wanma karena telah memberikan izin kepada PT ASI untuk mengelola pertambangan di sana.²⁹ Konflik meluas juga karena PT KSM melalui PT Ricobana dinilai telah memanfaatkan Suku Kawei sebagai tameng untuk kepentingan eksploitasi tambang mereka.³⁰

Di luar SDA Nikel, kekayaan SDA lainnya adalah batubara, migas, besi, dan uranium.³¹ Di luar itu, mutiara merupakan kekayaan alam khusus lain Raja Ampat dengan kualitas yang prima di dunia. Diketahui, sejak 10 tahun lalu telah ada beberapa perusahaan yang bergerak dalam budidaya mutiara,

28 Lihat juga, Ronny Dimara, "Eksploitasi Tambang di Raja Ampat: Siapa Untung, Siapa Buntung," 5 April 2008, <http://www.jatam.org/content/view/full/425/35/>, diakses 10 Agustus 2011.

29 "Yoris Tudung Ada Mafia Pertambangan," *Elsham News Service Papua, Antara*, 3 Mei 2010, <http://www.elshamnewservice.blogspot.com/2010/05/yoris-tudung-ada-maf...>, diakses pada 10 Agustus 2011.

30 Lihat "Ada Cukong Bertameng Masyarakat Adat Papua: Mafia Pertambangan Palsukan Izin Gubernur," 29 Juli 2011, *Rakyat Merdeka Online*, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=34651>.

31 "Minta Unhas Peduli Raja Ampat," 26 Maret 2001, <http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/26021/minta-unhas-ped...>, diakses 10 Agustus 2011.

dengan investasi besar.³² Demikian juga dengan kekayaan SDA rumput laut yang dapat dieksploitasi dan sangat potensial pengembangan di wilayah perairan Raja Ampat tersebut, dan juga pasarnya di dunia.³³ Sehingga, eksploitasi besar-besaran yang tidak ada dan dihormati aturan hukumnya, baik oleh pengusaha dalam maupun luar negeri, akan meningkatkan ancaman ekonomi wilayah Provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan itu.

V. Keamanan Lingkungan

Penambangan nikel besar-besaran tanpa amdal dan pengawasan audit lingkungan yang ketat akan memberikan dampak kerusakan (degradasi) lingkungan yang hebat di kemudian hari. Menurut LSM lingkungan yang khusus menyoroti amdal lingkungan yang muncul dari eksploitasi penambangan yang tidak terkontrol, yaitu Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), kawasan Raja Ampat kini terancam degradasi lingkungan akibat penambangan nikel besar-besaran, yang sesungguhnya masih merupakan kawasan konservasi, akibat aturan penambangan yang belum jelas.³⁴

Dari 21 perusahaan yang memperoleh ijin, tercatat 10 perusahaan beroperasi menambang nikel. Dilaporkan, sampai dewasa ini, masih ada perdagangan nikel ke Australia. Kapal tambang hilir-mudik antara perairan Australia-Raja Ampat membawa tanah liat dengan kandungan nikel dan kobalt.³⁵ Kelangkaan studi lingkungan yang benar merupakan salah satu penyebab ancaman kerusakan lingkungan Raja Ampat akibat penambangan yang dianggap merambah kawasan konservasi. Walaupun telah ada pelarangan penambangan nikel dari Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi, laporan menyebutkan terus berlangsungnya kegiatan kapal-kapal membawa nikel dan kobalt dari kawasan Raja Ampat menuju perusahaan Queensland Nickel di Australia milik jutawan Clive Palmer.³⁶

Tidak hanya dari eksploitasi pertambangan besar-besaran, ancaman terhadap keamanan lingkungan Kabupaten Raja Ampat dapat muncul pula dari terbukanya seluruh wilayah kepulauan itu bagi orang asing. Karena itulah, perlu ditetapkan dan dipisahkan bagian mana dari wilayah itu yang seharusnya

32 Damara, *loc.cit.*

33 Lihat "The Miracle of West Papua," *Majalah Topik Online*, <http://majalah-topik.co.id/readnews.php?id=248>, diakses pada 10 Agustus 2011.

34 Anwar Khumaini, "Jatam Minta Penambangan Nikel di Raja Ampat Dihentikan Total," *DetikNews.com*, <http://www.detiknews.com/read/2011/07/05/083833/1674564/10/jat>, 5 Juli 2011, diakses pada 10 Agustus 2011.

35 *Ibid.*

36 *Ibid.*

menjadi kawasan yang terbatas untuk dikunjungi (*restricted areas*), terutama wilayah yang kaya dan sensitif terhadap kehadiran dan intervensi lebih jauh manusia dan para pendatang. Tanpa itu, kehadiran turis dalam jumlah besar (tidak terbatas) akan memberi potensi ancaman yang besar terhadap keamanan lingkungan di sana.³⁷ Belajar dari Bali yang sudah melenceng pengelolaaannya, jauh dari potensi alamiah yang dimilikinya, wilayah Kabupaten Raja Ampat yang baru dimekarkan harus dikembangkan dengan perencanaan yang baik dan terkontrol. Wilayah ini tidak boleh dikendalikan oleh modal, terutama asal mancanegara, agar potensi atau kekayaan alam yang dimilikinya serta nilai-nilai kultur lokal dan kebijaksanaan lokalnya tidak segera sirna atau terkontaminasi.

Infrastruktur kepulauan belum banyak tersedia, sehingga masih banyak yang harus dikembangkan. Panjang jalan beraspal, yang dapat dilalui kendaraan masih amat terbatas, yaitu 8,62 km atau 3,91% dari jalan yang ada, sisanya jalan kerikil/batu,³⁸ yang hanya menghubungkan pelabuhan sampai kantor pemda dan penginapan tamu. Fasilitas penginapan berkondisi nyamanpun sangat sedikit, hanya ada 13 *cottage/resort* dengan 14 kamar.³⁹ Ketersediaan air bersih yang memadai merupakan masalah mendasar. Penduduk pada umumnya masih belum dapat menikmati fasilitas listrik secara optimal, seperti halnya sektor swasta yang bergerak dalam bisnis perhotelan dan pariwisata. Listrik sering mati tiba-tiba. Semua fasilitas pendukung untuk publik, apalagi tamu, masih sangat terbatas.

Belum digunakannya rencana tata ruang (RTRW) dalam pembukaan dan pengembangan lebih lanjut Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, terutama ibukota Waisai, di bagian Pulau Waigio Selatan, akan berdampak luas terhadap perkembangan kota di masa depan. Mengingat jumlah penduduk total masih sekitar 42.508 ribu jiwa, seharusnya hal ini sudah menjadi perhatian serius pemkab. Dengan angka pertumbuhan penduduk 6-6,5%, pemkab sudah harus berhati-hati dalam merancang dan membuat pembangunan perkotaan.⁴⁰ Sebab, tanpa perencanaan yang baik, ibukota Waisai dan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat yang sangat potensial sumber daya alamnya, secara menyeluruh akan padat jumlah penduduknya dalam kurun waktu tidak terlalu lama.

37 Penjelasan Arief Yuwono, Deputi Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan KLH, dalam FGD di P3DI, Setjen DPR, Jakarta, pada 18 Nopember 2011.

38 Data panjang jalan sampai tahun 2010 dari Dinas PU Kabupaten Raja Ampat, dalam *Kabupaten Raja Ampat dalam Angka*, 2010, BPS Kabupaten Raja Ampat, 2011.

39 *Ibid.*

40 Wawancara dengan Arthemias Mambrisau, Kabappeda Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Hal di atas selanjutnya akan meningkatkan ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan dan penghuninya di sana. Dengan pembangunan yang pesat, penataan kota akan menyebabkan banyak kasus penggusuran rumah dan sengketa pertanahan. Sementara, ketersediaan air bersih yang terbatas dari wilayah pegunungan, yang baru bisa diusahakan belakangan, akan semakin sulit dipenuhi. Selanjutnya, pekerjaan rumah pemkab akan semakin berat, karena harus mulai memikirkan perlunya penambahan gedung SMA, yang sekarang baru ada 1 buah dan belum selesai bangunannya. Demikian pula, akan muncul kebutuhan untuk menampung para lulusan SMA, dengan pembangunan pendidikan tinggi kejuruan atau/dan umum.

Tanpa kontrol atas pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut, upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Raja Ampat akan sulit dilakukan. Dengan besarnya mereka yang tidak terserap dalam lapangan kerja tradisional -sektor perikanan dan kelautan secara luas seperti budidaya rumput laut, mutiara, dan sebagainya- masalah sosial baru akan bermunculan, seperti meningkatnya kriminalitas, perambahan wilayah konservasi hutan dan laut, dan sebagainya. Sedangkan kehadiran orang/perusahaan asing yang kontras dengan kondisi kesejahteraan masyarakat lokal akan menimbulkan kecemburuan sosial dan implikasi sosial lebih jauh, yang akan mengganggu kedamaian setempat. Sekarang saja, pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan *bungalow* dan *cottages* yang harus mengorbankan rumah-rumah kumuh dan tanah-tanah yang semula diduduki penduduk lokal dapat memulai tumbuhnya benih-benih kesemburuan sosial antara penduduk setempat dengan pengusaha penginapan dan penanam modal di sektor akomodasi. Di sisi lain, kehadiran banyak pendatang, akan mengintroduksi nilai-nilai baru, yang bisa mengkontaminasi nilai-nilai asli yang kondusif, dan bisa menyebabkan gesekan atau konflik nilai dan budaya. Sehingga harus diwaspadai, munculnya di kemudian hari praktek prostitusi, maraknya peredaran minuman keras, dan lain-lain.

Kondisi kebersihan dan sanitasi penduduk pada umumnya belum baik. Bersamaan dengan masih terbatasnya akses penduduk ke perumahan yang layak dan air bersih, kondisi kesehatan penduduk masih harus diperbaiki. Diinformasikan, penyakit endemik akibat keadaan itu, seperti malaria, TB, dan diare masih menjadi ancaman. Pemkab sudah menyediakan tempat sampah yang dipisahkan antara sampah basah dan kering, namun karena budaya bersih dan disiplin masih rendah, sampah masih tampak dibuang di sana-sini, termasuk di sekitar pelabuhan, pantai, dan laut, yang pantas dikuatirkan dapat merusak kondisi Kepulauan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari.

VI. Kondisi Aparat Penegak Hukum

Di wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat terdapat kantor Polres dan Polisi Air. Sayangnya, kondisi kantor, personil, dan alat kerja, terutama untuk Polisi Air, tidak memadai. Jumlah personil baru bisa dipenuhi setengah dari yang dibutuhkan (264 dari idealnya 477 orang di Waisai atau 641 untuk 22 distrik di Raja Ampat). Di keseluruhan wilayah, hanya ada 3 Polsek, sehingga setiap Polsek harus menjaga keamanan 7-8 distrik. Idealnya, perlu penambahan sampai 7 Polsek baru, agar polisi bisa efektif bekerja menjaga keamanan di seluruh wilayah, terutama untuk penambahan jumlah polisi air.⁴¹ Karena wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat sebelumnya rawan dari kegiatan dan lalu-lintas *illegal logging*, di ibukota Waisai terdapat kantor Polisi Kehutanan, yang kantornya berupa sebuah rumah kecil. Sementara, Polisi Air belum mempunyai dermaga untuk tempat penyimpanan dan sandarnya kapal operasi mereka. Kantor mereka masih menumpang di Mapolresta Waisai, sedangkan markas baru di pinggir laut, belum dibangun; yang ada baru papan nama kantor mereka.

Keterbatasan BBM untuk operasi 3 *speed* yang ada, menjadi hambatan operasional polisi yang harus melayani 68 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Padahal, wilayah ini rawan dari pencurian ikan nelayan Filipina, dan sebelumnya, *illegal logging*. Minimnya dukungan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas adalah masalah berat lainnya yang dihadapi polisi di sana. Mereka dijelaskan tidak memperoleh tunjangan kemahalan seperti yang diterima aparat angkatan laut (lanal dan posal). Padahal, mereka harus menyewa rumah yang cukup mahal. Rumah dinas hanya tersedia untuk Kapolres dan Wakapolres. Itulah sebabnya, kebanyakan mereka, yang bukan penduduk setempat, tidak membawa keluarga mereka untuk tinggal di Waisai/Raja Ampat, tempat mereka bertugas.

Untuk mengawal penegakan hukum di wilayah perairan (laut), di ibukota Waisai dijaga oleh sebuah Posal, yang menjadi bagian dari Lanal Sorong, dengan kekutaan 5 orang (3 tenaga inti Angkatan Laut dan 2 tenaga pendukung), yang dipimpin seorang Perwira Pertama (Letda). Di Pulau Fani, pulau yang paling luar yang perairannya berbatasan langsung dengan perairan Negara Palau, dijaga oleh 1 pleton marinir, didukung alat kerja 1 *speed*. Untuk alat kerja, Posal hanya punya 1 *speed* dengan 1 mesin (bandingkan dengan Polres/Polair yang punya 3 *speed*!). Sulit dipercaya, untuk menjalankan operasi, BBM untuk *speed*

41 Penjelasan AKP Warsum Anis Rofiek, Kasubbinops, dan AKP Laodenika, Kasubbin SDM Polres Raja Ampat dalam wawancara di Waisai pada 22 Nopember 2011.

harus dibiayai dari kantong sendiri! Markas Posal sangat sederhana. Petugasnya tidak mempunyai perumahan, selain di tidur di (sekitar) kantor/markas. Yang lebih buruk lagi, salah seorang petugasnya dari kesatuan Pasukan Katak, sudah 2 tahun belum dirotasi, dan tidak tinggal bersama keluarganya, kecuali boleh pulang mengunjungi keluarga 1-2 kali setahun.

Semua aparat negara, terutama keamanan, berpendapat sama, *illegal logging* adalah ancaman utama wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Nelayan Filipina dengan 15-20 *pump-boat* adalah pelakunya, yang kemudian dibawa dengan kapal-kapal besar menuju pelabuhan General Santos di Filipina Selatan. Ikan tangkapan mereka besar-besar, terutama jenis Tuna, karena mereka memiliki keahlian mendeteksi dan menangkap ikan besar, yang dilengkapi alat dengan teknologi canggih. Dalam sekali tangkapan, bisa terdapat 100 ekor ikan tuna besar, seukuran manusia. Dilaporkan, pernah terdapat 57 nelayan Filipina dari 3 buah kapal. Frekuensi *illegal fishing* cukup tinggi, bisa 3-5 kasus per bulan.⁴² Karena itulah, cukup menguatirkan, jika ancaman keamanan yang tinggi terhadap seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat yang luas dan kaya ~mengingat begitu besarnya potensi kekayaan alam, terutama dari sektor kelautan atau perikanan~ hanya berupaya dicegah dengan posal berkekuatan 5 personil dan 1 *speed*, serta 3 Polsek dengan kekuatan 264 personil dan 3 *speed*. Itupun untuk Polisi Airnya tidak punya dermaga, sedangkan posal tidak dilengkapi peralatan yang dapat diandalkan untuk mendukung tugas-tugas operasional.

Di 3 pulau terluar, seperti Pulau Ayau, Pulau Abidon dan, terutama, Pulau Fani, ancaman keamanan atas kedaulatan nasional sangat tinggi. Setelah “insiden” ~hilangnya bendera Merah-Putih yang dipasang Bupati dan telah berganti dengan bendera putih~ pada Maret 2004, Jakarta memutuskan mengirimkan 1 pleton marinir untuk berdiam di Pulau Fani. Mereka dirotasi setiap 6 bulan sekali. Penduduk juga dikirim untuk mendiami pulau yang perairan lautnya berbatasan langsung dengan Negara Palau tersebut, sehingga kini terdapat sekitar 37 KK.⁴³ Pulau itu masih sangat minim fasilitas publik; penerangan listrik belum masuk. Di Pulau Ayau, sekitar 1 jam dengan *speed* dari P. Fani, yang sedikit lebih maju, tinggal 225 KK.

Ancaman keamanan yang dihadapi pulau-pulau terluar, seperti dijelaskan Danlanal Sorong, Kol. Laut (P) A. Simatupang, terdiri dari pelanggaran wilayah,

42 Wawancara dengan Mayor Agus, Asops Lanal Sorong, di Sorong pada 21 Nopember 2011.

43 Wawancara dengan Sekda Drs. Ferdinand Dimara, Msi, di Waisai, pada 23 Nopember 2011. Data dari Danlanal Sorong, Kol. Laut (P) A. Simatupang, dalam wawancara di Sorong pada 25 Nopember 2011 mengungkapkan hal berbeda, yaitu hanya ada 14 KK yang tinggal di sana.

pelanggaran peraturan perikanan, penggunaan bom ikan, dan penyelundupan hasil tambang –termasuk *illegal mining* di dalamnya. Pelanggaran wilayah sering dilakukan nelayan Filipina, dengan menggunakan perahu tradisional (cadik), namun dilengkapi GPS.⁴⁴ Mereka masuk secara ilegal ke wilayah RI untuk menangkap/mencuri ikan, terutama tuna yang besar-besar dan sangat mahal harganya dan menguntungkan untuk dijual di pelabuhan General Santos, Filipina Selatan.⁴⁵ Pelanggaran peraturan menangkap ikan umumnya terkait dengan pelanggaran aturan zonasi, yang sangat *rigid* di era pemekaran wilayah oleh nelayan Indonesia dari berbagai wilayah. Kasus penggunaan bom ikan banyak dilakukan oleh nelayan asal Sulawesi Selatan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan baku pupuk, seperti potasium, fosfat, dan lain-lain. Sementara, penyelundupan hasil tambang dilakukan oleh penduduk tradisional, terutama untuk nikel di bagian Timur dan Barat Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

Untuk merespon ancaman yang ada ini, TNI AL mengirim Satgas Puter (Satuan Tugas Pulau Terluar), yang terdiri dari 1 pleton marinir, sebagai bagian dari Kompi Marinir yang di Pulau Biak. Sesuai dengan Tupoksinya, yang bisa dilakukan Lanal Sorong adalah memperkuat daya dukung posal yang tugasnya terkait dengan mengamankan perairan wilayah kepala burung, walaupun keadaannya masih sangat terbatas, seperti posal yang ada di Waisai. Sekali lagi, hambatannya adalah keterbatasan suplai BBM, untuk operasi di wilayah yang sangat luas rentang kendalinya dan juga sangat tinggi dan beragam tingkat ancaman keamanannya. Sebagai konsekuensinya, harus ada *landbase* terdekat untuk suplai BBM dan logistik lainnya, untuk kelangsungan operasi supaya bisa berjalan rutin atau konsisten. Sehingga, muncul wacana solusi pembentukan “Armada Ketiga” –sebelumnya dikenal juga dengan “Kowil III– yang basis/pangkalannya di Sorong. Jika terbentuk “Armada Ketiga” (Kowil III), perosnial yang dibutuhkan di Lanal Sorong bisa mencapai 8.000 orang. Tanpa itu, operasi Guspurla dan Guskamla untuk masing-masing tupoksi mengamankan perbatasan perairan dengan negara tetangga dan wilayah kepulauan sulit dilakukan secara kontiniu.

Jadi keberadaan “Armada Ketiga” (Kowil III) akan diperlukan untuk *permanent deployment* angkatan perang RI.⁴⁶ Kecenderungan meningkatnya kehadiran orang asing dengan *yacht* mereka ke wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat

44 Wawancara dengan Kol. Laut (P) A. Simatupang, Danlanal Sorong, di Sorong pada 25 Nopember 2011.

45 Lihat wawancara sebelumnya dengan Mayor Agus, Asops Lanal Sorong, di Sorong pada 21 Nopember 2011.

46 Wawancara dengan Kol. Laut (P) A. Simatupang, Danlanal Sorong, di Sorong pada 25 Nopember 2011.

yang bisa masuk dari wilayah RI lainnya,⁴⁷ adalah juga salah satu alasan perlunya peningkatan kapasitas Lanal Sorong. Kerja sama yang lebih baik dari *stakeholders* lainnya, yakni aparat Kementerian Luar Negeri dan Dirjen Imigrasi untuk menyampaikan *security clearance* atas *yacht* atau orang asing yang masuk ke wilayah NKRI, tentu saja akan sangat membantu Lanal Sorong dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah keterbatasan kemampuan yang mereka miliki.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat menghadapi ancaman keamanan sosial dan lingkungan yang beragam dari berbagai pihak yang berminat dan memiliki kepentingan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam wilayah itu. Sayangnya sampai hampir satudasawarsa pasca-pemekaran wilayah itu sebagai kabupaten tersendiri, respons pemerintah daerah dan pusat terhadap adanya tipe ancaman keamanan itu belum memadai, dan bahkan lebih buruk lagi, pemda belum membuat RTRW untuk pengembangan daerahnya. Sementara itu, dalam waktu bersamaan, kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan hidup kawasan terbaik segitiga terumbu karang dunia tersebut terus berlangsung.

Terhadap Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, pemerintah pusat dan daerah harus membuat perencanaan dan disain besar pengembangan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, agar wilayah yang baru dimekarkan ini dapat berkembang dengan baik seperti yang direncanakan. Sehingga, berbagai potensi dan kekayaan SDA dan modal sosial yang dimilikinya tetap terpelihara dengan baik dalam jangka panjang, dan dapat diandalkan untuk menjadi sumber pemasukan (Pendapatan Asli Daerah -PAD) bagi pengembangan wilayah itu lebih baik lagi di masa depan. Bagian dari perencanaan dan disain besar ini adalah penyusunan RTRW yang komprehensif dan dilaksanakan secara konsisten di masa depan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengkaji secara hati-hati pengeluaran ijin pertambangan di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, mengingat wilayah ini merupakan wilayah konservasi alam yang harus dijaga ekstra hati-hati. Semua pihak, para penentu kebijakan dan aparat penegak hukum di sana, harus menyadari bahwa wilayah Kabupaten Raja Ampat eksosistemnya sangat sensitif atas setiap kegiatan penambangan, yang sangat berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan yang hebat di masa depan. Sebagai bagian dari upaya

⁴⁷ Menurut penjelasan Danlanal Sorong, terdapat 3.000 orang asing pada tahun 2009 dan 10.000 pada tahun 2010 –diantaranya orang Australia, Italia, AS dan lain-lain, masuk ke wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.

memberikan perhatian ekstra hati-hati ini, pemberian ijin usaha penambangan yang melibatkan pihak asing juga harus dipelajari secara lebih cermat, mengingat pihak asing tidak merasakan secara langsung implikasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah kegiatan mereka.

Untuk mencari solusi atas konflik-konflik pertambangan yang muncul belakangan, pihak yang berwenang perlu meneliti dan mengkaji kembali siapa yang sesungguhnya telah memenuhi ketentuan hukum dan secara sah berwenang melakukan eksploitasi pertambangan di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Dalam waktu bersamaan, aktifitas pertambangan yang telah melahirkan konflik perlu dihentikan dulu sampai semua jelas tentang pihak mana yang sesungguhnya telah mengantongi secara sah ijin eksploitasi pertambangan di Kabupaten Raja Ampat.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus lebih kretatif mengembangkan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat sebagai kawasan perikanan dan pariwisata alam, sehingga upaya konservasi lingkungan akan lebih terprioritaskan. Kedua pemerintah harus meminimalkan kegiatan eksploitasi tambang di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat agar tidak berimplikasi besar terhadap kelestarian lingkungan di sana. Dengan kata lain, pemerintah daerah setempat harus didorong dan dibantu untuk mengembangkan perairan dan sektor kelautan Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, atau sektor perikanan dan pariwisata, untuk berkembang dengan baik tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.

Lebih spesifik lagi, demi menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, perlu dibuat penetapan dan pemisahan antara wilayah konservasi dan yang boleh dikunjungi turis. Jumlah turis yang masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat juga harus dibatasi, terutama wilayah yang kaya SDA seperti terumbu karang, dan sekaligus sensitif terhadap intervensi atau gangguan manusia. Sedangkan eksploitasi pertambangan sedapat mungkin dapat dihindarkan, ataupun kalau dilakukan, telah memiliki Amdal yang cermat. Terhadap proyek-proyek pertambangan yang sudah berjalan dan sah, logis saja boleh dilanjutkan, jika telah memiliki ketentuan amdal yang ditetapkan. Jika tidak, proyek yang ada harus dievaluasi, atau bahkan dihentikan, untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan lebih besar lagi.

Kegiatan fungsi pengawasan DPR lintas-komisi harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan penambangan di Kabupaten Raja Ampat. Setiap adanya temuan terhadap pelanggaran ijin eksploitasi penambangan di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat harus segera ditindaklanjuti untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya dan

menyelamatkan kekayaan negara dan alam yang dapat dikorbankan oleh para pelanggarnya. Begitu pula, setiap konflik kewenangan yang muncul atau terjadi di lapangan harus segera dihentikan melalui berbagai upaya investigasi, negosiasi, dan penyelesaian hukum tuntas, agar tidak berkembang menjadi konflik komunal dan vertikal, sehingga situasi yang kondusif dapat dipelihara demi ketentraman hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, dan Provinsi Papua Barat secara lebih luas, serta ketenangan berusaha para pekerja, pebisnis, dan investor.

Secara realistis, di sisi lain, perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas Lanal Sorong dan, terutama posal, di Waisai, serta untuk gelar pasukan di Pulau Fani. Juga, adalah wajar, pemerintah perlu mendukung segera terbentuknya “Armada Ketiga” (Kowil III), mengingat pangkalan utama Tanjung Priok dan Surabaya terlalu jauh jaraknya untuk mendukung operasi tempur, keamanan laut, dan patroli rutin yang bisa menjangkau keseluruhan wilayah perairan dan sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Sementara, kapasitas dan kapabilitas dukung Lantamal Jayapura sangat terbatas untuk bisa mendukung dengan baik pelaksanaan tugas Lanal Sorong dan posal, apalagi yang terluar, di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat. Dengan gambaran ancaman keamanan yang beragam dan cenderung meningkat di masa depan, di satu sisi, dan kemampuan aparat penegak hukum yang masih amat terbatas, di sisi lain, diharapkan, kekayaan dan kelestarian alam, serta kedaulatan NKRI tetap dapat dijaga dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- “Ada Cukong Bertameng Masyarakat Adat Papua: Mafia Partambangan Palsukan Izin Gubernur,” 29 Juli 2011, *Rakyat Merdeka Online*, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=34651>. diakses 10 Agustus 2011.
- Buzan, Barry. *People, State, and Fear*. Sussex: Wheatsheaf, 1983.
- Buzan, Barry dan Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, New York: Cambridge University Press, 2009.
- Buzan, Barry dan Amitav Acharya (eds.). *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia*. New York: Routledge, 2010.
- Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998.
- Brown, Chris dan Kirsten Ainley. *Understanding International Relations*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- Candra, Kartika, “TNI AU Bakal Tambah Pangkalan,” *Media Indonesia*, 3 September 2011: A4.
- Dimara, Ronny. “Siapa yang Untung dan Siapa yang Buntung dari Hasil Eksploitasi Tambang Nickel di Raja Ampat,” *Papua Merdeka News*, 5 April 2008, <http://www.papua-post.worldpress.com/category/media-spm/opini-analisis/p...>, diakses 10 Agustus 2011.
- _____. “Eksploitasi Tambang di Raja Ampat: Siapa Untung, Siapa Buntung,” 5 April 2008, <http://www.jatam.org/content/view/425/35/>, diakses 10 Agustus 2011.
- FitzRoy, Felix R dan Elissaios Papyrakis. *An Introduction to Climate Change, Economics and Policy*. UK: Earthscan, 2010.
- “Hanya 12 Pulau Terluar yang Dijaga oleh TNI,” *Kompas*, 19 Agustus 2011: P4.
- “Hanya Ada 13.466 Pulau di Indonesia,” *Kompas*, 8 Februari 2011.
- Homer-Dixon, Thomas F. *Environment, Scarcity and Violence*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1999.
- Poltak Partogi Nainggolan:** Keamanan Sosial...

- Homer-Dixon, Thomas F dan Jessic Blitt. *Evidence: Links Among Environment, Population, and Scarcity*. New York: Rowman and Littlefield, 1991.
- Holsti, KJ. *The State, War, and the State of War*. UK: Cambridge University Press, 1996.
- _____. *Taming the Sovereigns: Institutional Change in International Politics*. UK: Cambridge University Press, 2004.
- Kabupaten Raja Ampat dalam Angka, 2010, BPS Kabupaten Raja Ampat, 2011.
- “Kabupaten Sorong: Potensi PLTG: Penerang Masa Depan di Papua,” *Koran Tempo*, 18 Agustus 2011: 9.
- “Kepulauan Raja Ampat Pusat Segitiga Karang,,” *Majalah Topik Online*, <http://www.majalahtopik.co.id//readnews.php?id=80>, diakses pada 10 Agustus 2011.
- Khumaini, Anwar. “Jatam Minta Penambangan Nikel di Raja Ampat Dihentikan Total,” *DetikNews.com*, <http://www.detiknews.com/read/2011/07/05/083833/1674564/10/jat>, 5 Juli 2011, diakses pada 10 Agustus 2011.
- Lacy, Mark J. *Security and Climate Change: International Relations and the Limit of Realism*. New York: Routledge: 2005.
- Makalah presentasi Prof. Rizald Max Rompas, Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, dalam FGD di P3DI Setjen DPR pada 4 Agustus 2011.
- “Minta Unhas Peduli Raja Ampat,” 26 Maret 2001, <http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/26021/minta-unhas-ped...> diakses 10 Agustus 2011.
- National Security Implications of Climate Change for US Naval Forces*. Washington DC: National Research Council, 2011.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Komnas HAM, Elsam, KontraS, dan Imparsial.
- Susanto, Ichwam, “Potensi Wilayah: Kekayaan Laut Raja Ampat yang ‘Terlupakan’”, *Kompas*, 24 Agustus 2007: 62.
- “The Miracle of West Papua,” *Majalah Topik Online*, <http://majalahtopik.co.id/read-news.php/?id=248>, diakses pada 10 Agustus 2011.
- “Yoris Tuding Ada Mafia Pertambangan,” *Elsham News Service Papua, Antara*, 3 Mei 2010, <http://www.elshamnewservice.blogspot.com/2010/05/yoris-tuding-ada-maf...>, diakses pada 10 Agustus 2011.

Williams, Paul D. *Security Studies: An Introduction*. Routledge, New York, 2008.

Wawancara:

Wawancara dengan Sultan Ternate di Kota Ternate pada Juli 2011.

Wawancara dengan Wadanlantamal XI, Kol. (Mar) Bambang di Manado pada Juli 2011

Wawancara dengan Prof. Tridoyo Kusumastanto, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB di Kampus Pasca-Sarjana IPB Bogor pada 11 Agustus 2011.

Wawancara dengan Mayor Agus, Asops Lanal Sorong, di Sorong pada 21 Nopember 2011.

Wawancara dengan AKP Warsum Anis Rofiek, Kasubbinops Polres Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Wawancara dengan AKP Laodenika, Kasubbin SDM Polres Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Wawancara dengan Marcus Wanma, Bupati Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Wawancara dengan Arthemias Mambrisau, Kabappeda Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Wawancara dengan Tommy Jong, Kadinkes Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, di Waisai pada 22 Nopember 2011.

Wawancara dengan Kadis Pariwisata Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo, di Waisai dan dalam perjalanan ke Waisai-Sorong pada 23 dan 24 Nopember 2011.

Wawancara dengan Danlanal Sorong, Kol. Laut (P) A. Simatupang, di Sorong pada 25 Nopember 2011.

FGD dengan Prof. Dr. Dietrich Bengen, peneliti IPB, di P3DI pada 18 Nopember 2011 di P3I, Setjen DPR, Jakarta.

FGD dengan Deputi Penanggulangan Kerusakan LH, KLH, Arief Yuwono, dalam di P3DI, Setjen DPR, Jakarta pada 18 Nopember 2011.

FGD dengan Ir. Sigit, Kasubdit Pemberdayaan Pulau-pulau Pesisir KKP, di P3DI, Setjen DPR, Jakarta pada 18 Nopember 2011.

